

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi manajemen bimbingan dan konseling dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SMAS Ma'arif NU Sirau Kemranjen, dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen bimbingan dan konseling telah dilaksanakan melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) secara sistematis dalam mendukung pembinaan kedisiplinan siswa. Ketiga rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi manajemen layanan khusus peserta didik bidang bimbingan dan konseling dalam meningkatkan kedisiplinan siswa dilaksanakan melalui tahapan manajemen yang terstruktur. Pada tahap perencanaan, guru BK melakukan identifikasi kebutuhan siswa, menyusun program layanan, serta merencanakan kegiatan bimbingan dan konseling pada awal tahun atau semester. Pada tahap pengorganisasian, terdapat pembagian tugas di antara guru BK serta koordinasi dengan wali kelas, waka kesiswaan, guru mata pelajaran, orang tua siswa dan pengurus pondok pesantren. Pelaksanaan dilakukan dengan melalui pemantauan kedisiplinan, pemberian layanan bimbingan individual maupun kelompok, pencatatan pelanggaran, serta tindak lanjut secara bertahap. Sementara itu,

pengawasan dilakukan melalui pemantauan perilaku siswa dan penggunaan administrasi BK, khususnya buku pelanggaran, sebagai salah satu dasar dalam menentukan tindak lanjut. Implementasi tersebut menunjukkan bahwa manajemen BK memiliki peran dalam membantu meningkatkan kedisiplinan siswa melalui layanan yang sistematis, koordinatif, dan berkelanjutan.

2. Peran manajemen layanan khusus peserta didik bidang bimbingan dan konseling dalam mempertahankan konsistensi kualitas layanan BK terlihat melalui pengelolaan layanan yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pelanggaran, tetapi juga pada pemantauan dan tindak lanjut terhadap perkembangan siswa. Administrasi BK, pencatatan pelanggaran, koordinasi antar pihak, serta pemantauan setelah pemberian layanan menjadi instrumen yang mendukung konsistensi pelaksanaan layanan. Ketika siswa kembali melakukan pelanggaran, guru BK memberikan tindak lanjut berupa teguran dan pencatatan pelanggaran sesuai dengan tingkat permasalahannya. Meskipun demikian, kegiatan evaluasi program secara menyeluruh belum dilaksanakan secara rutin dan masih lebih banyak dilakukan pada waktu-waktu tertentu, sehingga aspek evaluasi menjadi bagian yang masih perlu diperkuat untuk menjaga kualitas layanan BK secara berkelanjutan. Lebih lanjut, upaya dalam mempertahankan hasil pembinaan kedisiplinan siswa dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, pencatatan administrasi pelanggaran, pemberian tindak lanjut secara bertahap, serta penguatan koordinasi antara

guru BK dengan wali kelas, guru mata pelajaran, pihak sekolah, orang tua dan pengurus pondok pesantren. Berdasarkan administrasi BK, khususnya buku pelanggaran kedisiplinan, terlihat adanya perubahan perilaku kedisiplinan siswa setelah program pembinaan dilaksanakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan memberikan hasil positif terhadap kedisiplinan siswa. Namun, keberhasilan tersebut tetap membutuhkan manajemen yang berkelanjutan agar perubahan yang telah dicapai dapat dipertahankan. Dengan demikian, keberlanjutan pembinaan tidak hanya bergantung pada guru BK, tetapi membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh pihak yang berhubungan dengan kehidupan siswa di sekolah maupun di lingkungan pondok pesantren.

3. Faktor pendukung dan penghambat implementasi manajemen layanan khusus peserta didik bimbingan dan konseling dalam meningkatkan kedisiplinan siswa didukung oleh beberapa faktor, yaitu adanya dukungan dan komitmen dari kepala sekolah, kerjasama antara guru BK dengan wali kelas, guru mata pelajaran, tenaga kependidikan, orang tua, serta pengurus pondok pesantren. Selain itu, keberadaan tata tertib dan kebijakan sekolah menjadi landasan dalam pelaksanaan pembinaan kedisiplinan siswa. Koordinasi antara pihak sekolah dengan orang tua dan pengurus pondok pesantren juga menjadi faktor penting karena pembinaan kedisiplinan siswa tidak hanya berlangsung di lingkungan sekolah, tetapi juga dalam lingkungan pondok pesantren. Dengan adanya kerja sama dan pembagian peran tersebut, pelaksanaan layanan BK dapat berjalan lebih terarah dan

mendukung upaya peningkatan kedisiplinan siswa. Adapun faktor penghambat dalam implementasi manajemen BK meliputi pelaksanaan beberapa program yang pada awalnya belum berjalan secara optimal, keterbatasan waktu layanan BK karena guru BK tidak memiliki jam khusus di kelas sehingga tidak selalu dapat mengetahui kondisi dan permasalahan siswa secara langsung, serta masih adanya siswa yang memiliki kesadaran dan motivasi disiplin yang rendah. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung layanan BK serta belum optimalnya dukungan dan koordinasi dari sebagian pihak juga menjadi kendala dalam pelaksanaan manajemen BK. Meskipun demikian, berbagai hambatan tersebut dapat diminimalkan melalui koordinasi, evaluasi, dan kerja sama secara berkelanjutan antara guru BK, pihak sekolah, orang tua, dan pengurus pondok pesantren. Dengan demikian, keberhasilan implementasi manajemen BK dalam meningkatkan kedisiplinan siswa tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program BK, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan lingkungan sekolah dan pondok pesantren serta keterlibatan seluruh pihak yang berkaitan dengan pembinaan siswa.

## **B. Implikasi**

Secara teoritis, penelitian ini memberikan implikasi bahwa konsep manajemen bimbingan dan konseling dapat diterapkan sebagai bagian strategis dalam upaya meningkatkan kedisiplinan siswa. Temuan penelitian memperkuat pemahaman bahwa keberhasilan layanan BK tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan layanan kepada siswa, tetapi juga oleh penerapan

fungsi manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi. Pengelolaan yang sistematis memungkinkan layanan BK dilaksanakan berdasarkan kebutuhan siswa dan arah yang jelas dalam penanganan permasalahan kedisiplinan.

Selain itu, penelitian memperkuat perspektif teoritis bahwa peningkatan kedisiplinan siswa merupakan proses yang membutuhkan koordinasi dan kesinambungan. Dalam konteks sekolah yang terintegrasi dengan lingkungan pondok pesantren, manajemen BK tidak hanya berjalan secara individual, tetapi memerlukan sinergi antara guru BK dengan wali kelas, guru mata pelajaran, kepala sekolah, waka kesiswaan, orang tua dan pengurus pondok pesantren. Temuan tersebut memberikan penguatan terhadap teori manajemen pendidikan bahwa pencapaian tujuan pendidikan membutuhkan pembagian tugas, koordinasi, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara terpadu.

Penelitian ini juga memberikan implikasi bahwa administrasi BK dapat berfungsi tidak hanya sebagai dokumentasi, tetapi sebagai instrumen pengendalian dan dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan layanan. data pelanggaran yang terdokumentasi dapat digunakan untuk melihat perkembangan kedisiplinan siswa, menentukan tindak lanjut, serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program BK berikutnya. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman teoritis mengenai pentingnya pengelolaan data dan evaluasi dalam menjaga keberlanjutan kualitas layanan BK.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi teoritis bahwa keberhasilan manajemen bimbingan dan konseling dalam meningkatkan kedisiplinan siswa tidak hanya bergantung pada pelaksanaan fungsi manajemen secara internal, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan dan keterlibatan berbagai pihak dalam lingkungan pendidikan. Temuan penelitian memperkuat pemahaman bahwa fungsi manajemen BK yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan/evaluasi akan lebih efektif apabila didukung oleh koordinasi dan kolaborasi antara guru BK, kepala sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran, orang tua, serta pengurus pondok pesantren.

Secara teoritis, faktor pendukung berupa kepemimpinan kepala sekolah, kerja sama antarpendidik, keberadaan tata tertib, serta koordinasi dengan orang tua dan pengurus pondok pesantren menunjukkan bahwa manajemen BK perlu dipandang sebagai suatu sistem yang melibatkan berbagai komponen pendidikan. Sementara itu, faktor penghambat seperti keterbatasan waktu layanan, rendahnya kesadaran sebagian siswa, keterbatasan sarana prasarana, dan belum optimalnya koordinasi menunjukkan bahwa efektivitas manajemen BK juga dipengaruhi oleh kondisi struktural dan lingkungan tempat layanan tersebut dilaksanakan.

Dengan demikian, penelitian ini memperkuat perspektif teoritis bahwa peningkatan kedisiplinan siswa melalui manajemen BK merupakan proses yang bersifat kolaboratif, sistematis, dan berkelanjutan. Dalam konteks sekolah berbasis pondok pesantren, teori manajemen BK juga perlu mempertimbangkan keterhubungan antara sistem sekolah dan lingkungan

pondok pesantren, karena keduanya memiliki peran dalam membentuk dan mempertahankan perilaku disiplin siswa.

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kedisiplinan siswa akan lebih efektif apabila dilaksanakan melalui sinergi antara guru bimbingan dan konseling, kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wali kelas, guru mata pelajaran, orang tua, dan pengurus pondok pesantren. Kolaborasi tersebut memungkinkan proses pembinaan berlangsung secara berkelanjutan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan pondok pesantren. Selain itu, integrasi pembinaan karakter religius dengan layanan bimbingan dan konseling menjadi salah satu strategi yang dapat diterapkan pada sekolah berbasis pesantren dalam membentuk perilaku disiplin peserta didik.

Temuan penelitian ini juga memberikan implikasi bahwa penguatan aspek evaluasi program, pemanfaatan administrasi layanan secara optimal, serta penyediaan waktu layanan bimbingan dan konseling yang memadai perlu menjadi perhatian sekolah agar implementasi manajemen bimbingan dan konseling semakin efektif dalam mendukung perkembangan peserta didik.

### **C. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi kepala sekolah, diharapkan dapat terus memberikan dukungan terhadap pengembangan manajemen bimbingan dan konseling melalui penyediaan kebijakan, sarana dan prasarana, serta penguatan koordinasi

antarwarga sekolah. Selain itu, perlu dipertimbangkan pemberian alokasi waktu layanan bimbingan dan konseling secara klasikal agar pelaksanaan layanan preventif dan pengembangan dapat berjalan lebih optimal.

2. Bagi guru bimbingan dan konseling, diharapkan dapat terus mengembangkan inovasi layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, meningkatkan kualitas evaluasi program secara berkala, serta memperkuat dokumentasi dan tindak lanjut setiap layanan yang diberikan sehingga efektivitas pembinaan kedisiplinan dapat terus ditingkatkan.
3. Bagi guru mata pelajaran, wali kelas, dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, diharapkan tetap menjaga koordinasi yang intensif dengan guru bimbingan dan konseling dalam melakukan pemantauan, pembinaan, dan penanganan permasalahan kedisiplinan siswa sehingga tercipta sistem pembinaan yang berkesinambungan.
4. Bagi orang tua dan pengurus pondok pesantren, diharapkan dapat terus meningkatkan komunikasi dan kerja sama dengan pihak sekolah dalam melakukan pembinaan perilaku siswa sehingga proses pendidikan karakter dan kedisiplinan berlangsung secara konsisten di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga dan pondok pesantren.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, melibatkan lebih banyak satuan pendidikan, atau mengkaji efektivitas setiap jenis layanan bimbingan dan konseling terhadap peningkatan kedisiplinan siswa menggunakan pendekatan maupun metode penelitian yang berbeda sehingga dapat

memberikan pengembangan keilmuan di bidang manajemen bimbingan dan konseling.